

**HUBUNGAN LUAS GARAPAN HUTAN RAKYAT
DENGAN PENDAPATAN PETANI
(Kasus pada Kelompok Tani Alam Raya Desa Pamedaran Kecamatan
Ketanggungan, Kabupaten Brebes)**

Dudung Abdurachman., Andung Rokhmat, H., dan Harso Ihwan Setiawan

ABSTRACT

Forestry development have to be non-stoped to be improved by able to yield the raw material which enough for industrial raw material requirement accomplishment and wood requirement, improving purchasing power of people and able to continue the industrialization process and also more and more inwrought and related with the industrial sector and service go to formed is network of activity of productive agroindustri and agrobisnis.

Research conducted in Pamedaran Village, Ketanggungan Subdistrict, Brebes District, from June until August 2007. This research aim to to know the correlation land size of people forest with the farmer income in Pamedaran Village, Ketanggungan Subdistrict, Brebes District.

Method used in this research is descriptive method with the approach survey. Data collecting of Primary obtained by through interview with the responder farmer use the questionnaire, and data sekunder obtained from existing institution of its bearing with this research. To know the correlation of between land size of people forest with the farmer income used by Test of Correlation coefficient of Rank Spearman.

Result of research indicate that there are real correlation between land size with the farmer income of people forest. Income of people forest with the land size mean of farm 0,468 ha equal to Rp. 2.550.318 or equivalent of Rp. 5.451.752 per hectare per year, with the value R/C of equal to 3,24.

Keywords : land size, farmer income, people forest

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor kehutanan masih merupakan sektor andalan dalam pemulihan pembangunan ekonomi nasional, untuk itu keseluruhan kebijaksanaan makro termasuk kebi-

jaksanaan investasi sudah saatnya berpihak pada sektor kehutanan. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, di era reformasi ini, masyarakat kehutanan harus terbuka terhadap segala kemungkinan perubahan dalam memajukan

pembangunan kehutanan, seperti penyesuaian organisasi/kelembagaan, peran aparat dalam tata hubungannya dengan masyarakat, peran pemerintah (institusi) pusat dalam hubungannya dengan pemerintah daerah, kebijakan dan strategi pem-bangunan.

Pembangunan di bidang kehutanan di era reformasi ini, secara keseluruhan menunjukkan hasil yang cukup berarti, walaupun belum seperti yang diharapkan. Dengan indikasi perbaikan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang kehutanan di era reformasi yang cukup menggembirakan, diharapkan adanya kebijakan terhadap tahapan-tahapan program yang dimulai dari bawah (*bottom up planning*) dengan melibatkan lebih banyak masyarakat dengan pola pemberdayaan, sehingga iklim usaha dibidang kehutanan lebih bergairah.

Pembangunan kehutanan harus terus ditingkatkan agar mampu menghasilkan bahan baku yang cukup bagi pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dan kebutuhan kayu bulat/kayu rakyat, meningkatkan daya beli rakyat dan mampu melanjutkan proses industrialisasi serta makin terkait dan terpadu dengan sektor industri dan jasa menuju terbentuknya jaringan kegiatan agroindustri dan agrobisnis yang produktif.

Sejalan dengan Otonomi Daerah, sebagaimana isi dari Pasal 10 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan : "Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di

wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Potensi hutan di Kabupaten Brebes, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam wilayah administratif Kabupaten, dengan luas wilayah 166.177 ha, terdiri dari hutan negara 49.599,02 ha yang menyebar di dua Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan 11 kecamatan serta 90 desa. Wilayah hutan negara tersebut meliputi KPH Balapulung seluas 22.307,22 ha dan KPH Pekalongan seluas 27.251,80 ha (Dinas Pertanian Kehutanan dan Konservasi Tanah Kabupaten Brebes, 2006). Selain Kesatuan Pemangku Hutan, Kabupaten Brebes juga mengembangkan kegiatan hutan rakyat. Kebijakan pemerintah Kabupaten Brebes dalam menyikapi persoalan dan perubahan paradigma "*state based forest management*" menuju "*community based forest resources management*" telah disusun dan dimuat dalam kebijakan strategis berupa pembuatan hutan rakyat di atas lahan milik petani/masyarakat. Pengembangan hutan rakyat bertujuan untuk menambah pilihan masyarakat dalam pengembangan usaha, penganekaragaman sumber pendapatan dan perluasan lapangan kerja serta mengurangi tekanan penduduk terhadap sumber daya hutan (Departemen Kehutanan, 1996).

Secara menyeluruh pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Brebes telah dimulai sejak tahun 1983, dan

setiap tahunnya menunjukkan peningkatan yang berarti. Pada tahun 2001 luas hutan rakyat di Kabupaten Brebes seluas 7.466,95 ha, meningkat menjadi 10.943,52 ha, yang berarti terjadi peningkatan sebesar 3.467,57 ha. Rata-rata per tahunnya Kabupaten Brebes mengembangkan hutan rakyat seluas 8.825,29 ha, sedangkan untuk Kecamatan Ketanggungan seluas 933 ha per tahun.

Dalam kegiatan pengembangan hutan rakyat diperlukan lahan, karena terbatasnya kepemilikan lahan usaha merupakan salah satu masalah dalam meningkatkan produktivitas usahatani, sehingga menghambat keberhasilan pengembangan hutan rakyat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kajian lebih lanjut mengenai usaha pengembangan hutan rakyat berdasarkan luas lahan garapan perlu mendapat perhatian dan ditelusuri melalui penelitian.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalahnya sebagai berikut : “Apakah terdapat hubungan nyata antara luas garapan hutan rakyat dengan pendapatan petani di Desa Pamedaran, Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes” ?.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan luas garapan hutan rakyat dengan pendapatan

petani di Desa Pamedaran, Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa informasi rekomendasi untuk kebijaksanaan dalam pengembangan hutan rakyat, baik untuk petani, masyarakat dan instansi terkait. Selain itu juga menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi peneliti khususnya tentang pengembangan hutan rakyat, dalam rangka peningkatan pendapatan petani.

1.4 Kerangka Pemikiran

Dalam pengembangan hutan rakyat sampai saat ini sering menghadapi masalah dalam mencapai tingkat keberhasilannya. Salah satu masalah yang dihadapi adalah masalah rendahnya kemampuan pihak petani dalam mengelola keberhasilan pengembangan hutan rakyat. Keadaan ini tidak terlepas dari faktor perilaku seseorang dan perilaku seseorang ini akan dipengaruhi faktor dalam dan faktor luar, yang secara simultan berpengaruh terhadap seseorang dalam aktivitasnya. Namun demikian kekuatan pengaruhnya berbeda untuk setiap faktornya.

Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat dalam individu responden yang dapat digunakan untuk memotivasi diri sendiri atau dengan kata lain merupakan dorongan dalam diri sendiri untuk ikut berpartisipasi dalam program hutan rakyat. Salah satu faktor internal adalah luas lahan usahatani. Sedangkan faktor eksternal adalah

faktor-faktor yang terdapat di luar diri responden yang dapat memotivasi atau mendorong responden untuk berpartisipasi dalam program hutan rakyat.

Hasil penelitian Tim Bina Swadaya (2001), menunjukkan bahwa terdapat pengaruh nyata antara luas usahatani hutan rakyat dengan pendapatan petani. Hal ini terbukti dari koefisien korelasi luas usahatani menunjukkan nilai positif yaitu sebesar 0,524, artinya semakin luas usahatani hutan rakyat, maka semakin tinggi tingkat pendapatan petani. Dengan kata lain semakin luas usahatani hutan rakyat akan diikuti dengan semakin besar pendapatan petani yang diperoleh.

Menurut Sugarda (1981) bahwa petani dengan luas lahan usahatani yang sempit banyak menghadapi hambatan dalam peningkatan usahatannya, terutama jika dihadapkan dengan penggunaan inovasi atau teknologi baru. Selanjutnya Mardikanto (1993), mengemukakan bahwa petani berlahan sempit tidak dapat melaksanakan usahatani secara intensif karena harus melakukan kegiatan-kegiatan di luar usahatannya untuk memperoleh pendapatan guna pemenuhan kebutuhan keluarganya. Di lain pihak Kasryno (1984) menyatakan bahwa petani yang mempunyai lahan luas, cenderung untuk mengadakan perubahan teknologi, dengan maksud meningkatkan produktivitas dalam usahatannya.

1.5 Hipotesis

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, dapat ditentukan hipotesisnya sebagai berikut : “Terdapat hubungan nyata antara luas garapan hutan rakyat dengan pendapatan petani di Desa Pamedaran, Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes”.

II. METODE PENELITIAN

2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Pamedaran, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposive dengan pertimbangan desa tersebut mempunyai wilayah hutan rakyat untuk dijadikan sebagai obyek penelitian. Hal ini diketahui dari penelitian pendahuluan bahwa desa tersebut mempunyai luasan hutan rakyat yang produktif. Penelitian dilaksanakan bulan Juni sampai Agustus 2007.

2.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan survey, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data-data dari fenomena yang berlangsung dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, tentang institusi sosial, ekonomi atau politik dari suatu kelompok atau daerah (Natsir, 1998). Satuan analisis penelitian adalah petani yang melaksanakan pengembangan hutan rakyat.

2.3 Teknik Penarikan Sampel

Dari hasil penelitian pendahuluan, diperoleh data jumlah petani hutan rakyat di Desa Pamedaran, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes sebanyak 49 orang. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara sensus, artinya semua petani yang mengusahakan hutan rakyat dijadikan sampel.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan

(kuesioner) yang telah disiapkan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan petani, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.
2. Data sekunder merupakan data pendukung yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan data dari berbagai instansi dan lembaga yang terkait dengan penelitian.

Tabel 1. Sumber dan Cara Pengumpulan Data

No.	Jenis Data	Sumber Data	Cara Pengumpulan Data
1.	Data Primer		
	a. Keadaan Responden	Petani	Kuesioner/Wawancara
	b. Usahatani Hutan Rakyat	Petani	Kuesioner
2.	Data Sekunder		
	a. Keadaan Penduduk	Monografi Desa	Pencatatan data
	b. Sarana dan Prasaran	Monografi Desa	Pencatatan data
	c. Perkembangan Hutan Rakyat	Desa/Dinas	Studi pustaka

2.5 Operasional Variabel

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka diperlukan suatu batasan dalam oprasionalisasi variabel adalah sebagai berikut :

1. Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya, dengan ketentuan luas minimum 0,25 ha dan penutup tajuk tanaman kayu-kayuan lebih

50% dan atau pada tanaman tahun pertama sebanyak minimal 500 batang tanaman (Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2004)

2. Luas lahan adalah luas lahan yang digarap petani baik hak milik sendiri maupun orang lain yang ditanami pohon kehutanan yang produktif, dan dinyatakan dalam hektar.
3. Pendapatan petani adalah pendapatan yang diperoleh petani

yang bersumber dari usahatani hutan rakyat (tanaman kehutanan dan tanaman pangan), yang dinyatakan dalam rupiah per tahun.

4. *Revenue Cost Ratio (R/C)* adalah perbandingan dari penerimaan usahatani dengan biaya usahatani
5. Penjarangan 1 adalah penebangan sebagian tanaman jati yang dilakukan pada umur tanaman jati 5 – 7 tahun
6. Penjarangan 2 adalah penebangan sebagian tanaman jati yang dilakukan pada umur tanaman jati 11 – 12 tahun
7. Tebang habis adalah penebangan seluruh tanaman jati yang dilakukan pada umur tanaman jati 22 tahun

2.6 Teknik Pengolahan Data

Data yang dihasilkan dianalisis secara deskriptif untuk menentukan biaya produksi dan penerimaan. Untuk mengetahui pendapatan usahatani hutan rakyat dihitung menurut model matematika (Ida Nuraeni dan Herman Hidayat, 1994) sebagai berikut :

1. Pendapatan Usahatani
Pendapatan = Penerimaan - Biaya

2. *Revenue Cost Ratio (R/C)*

$$R/C = \frac{\text{Total penerimaan usahatani}}{\text{Total biaya usahatani}}$$

Untuk mengetahui hubungan antara luas lahan usahatani hutan rakyat dengan pendapatan petani digunakan Uji Koefisien korelasi jenjang Spearman (rs). Tingkat signifikan dari hubungan luas garapan hutan rakyat dengan pendapatan petani dianalisis dengan pendekatan uji t (Wijaya, 2000)

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Luas Lahan Garapan

Luas lahan garapan petani responden di daerah penelitian adalah berkisar 0,25 - 1,00 ha, dengan rata-rata 0,468 ha. Hasil penelitian diperoleh sebagian besar petani responden mempunyai luas lahan garapan 0,50 ha – 0,75 ha yaitu sebanyak 26 orang (53,06%), petani dengan luas lahan garapan kurang 0,50 ha sebanyak 20 orang (40,82%), dan petani responden yang mempunyai luas lahan garapan lebih 0,75 ha sebanyak 3 orang (6,12%).

Tabel 2. Luas Lahan Garapan Petani Responden

No.	Luas Lahan Garapan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Sempit (< 0,50 ha)	20	40,82
2.	Sedang (0,50 – 0,75 ha)	26	53,06
3.	Luas (> 0,75 ha)	3	6,12
	Jumlah	49	100,00

2. Pendapatan Petani

Pendapatan petani ini merupakan rata-rata pendapatan dari petani responden yang dihitung dari hasil penerimaan produksi kayu jati dan jagung setelah dikurangi dengan biaya usahatani yang dikeluarkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani di Desa Pamedaran, Kecamatan Ketanggungan, hutan rakyat yang digarap kelompok tani Alam Raya sudah berumur 21 tahun, sudah melakukan pemungutan hasil dari tanaman jati dua kali, yaitu melalui penjarangan tanaman (Tabel 3).

Biaya yang dikeluarkan petani dalam usahatani hutan rakyat (tanaman pokok jati, dan palawija jagung) per tahun dengan rata-rata

luas lahan 0,468 ha yaitu sebesar Rp. 1.139.147 atau setara dengan Rp. 2.434.147 per hektar per tahun. Penerimaan dari hasil penjualan kayu jati dan jagung yaitu sebesar Rp. 3.689.465 atau setara dengan Rp. 7.885.899 per hektar per tahun, sehingga pendapatan petani yang diperoleh adalah sebesar Rp. 2.550.318 atau setara Rp. 5.451.752 per hektar per tahun, dengan nilai R/C sebesar 3,24. Artinya dengan pengeluaran biaya usahatani hutan rakyat yang dikeluarkan sebesar Rp. 1,00, maka akan diperoleh penerimaan sebesar Rp. 3,24. Hal ini menunjukkan bahwa usahatani hutan rakyat layak untuk dikembangkan.

Tabel 3. Analisis Usahatani Hutan Rakyat Pola Tumpangsari per Hektar per Tahun

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
		per 0,468 ha	per hektar
1.	Biaya Tetap		
	a. Sewa lahan	15.439.286	33.000.000
	b. Peralatan kerja	70.179	150.000
	c. Gubuk kerja	327.500	700.000
	Biaya Tetap per periode (22 tahun)	15.836.964	33.850.000
	Biaya Tetap per tahun	719.862	1.538.636
2.	Biaya Variabel		
	Tanaman Pokok (Jati)		
	a. Bibit jati	604.347	1.291.734
	b. Benih Jagung	183.571	392.366
	c. Pupuk	2.040.500	4.361.375
	d. Pestisida	251.865	538.337
	e. Ajir	60.435	129.173
	f. Tenaga kerja	6.083.546	13.002.999
	Biaya variabel per periode (22 tahun)	9.224.264	19.715.984
	Biaya variabel per tahun	419.285	896.181

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
		per 0,468 ha	per hektar
3.	Total Biaya usahatani Hutan Rakyat	25.061.228	53.565.984
	Biaya Total per tahun	1.139.147	2.434.147
4.	Penerimaan		
	a. Jati		
	- Penjarangan I	1.205000	2.576.109
	- Penjarangan II	1.609.314	3.439.755
	- Tebang Pilih	72.041.212	153.981.216
	b. Produksi Jagung	6.312.705	13.492.705
	Total Penerimaan per periode (22 thn)	81.168.231	173.489.785
	Total Penerimaan per tahun	3.689.465	7.885.899
4.	Pendapatan per periode (22 tahun)	56.107.003	119.923.801
	Pendapatan per per tahun	2.550.318	5.451.752
5.	Revenue Cost Ratio (R/C)	3.24	3.24

Selanjutnya, berdasarkan klasifikasi usahatani hutan rakyat dapat dilihat pendapatan petani responden dalam pada Tabel 4.

Tabel 4. Kelas Pendapatan Petani Responden per Tahun

No.	Pendapatan Petani (Rp/tahun)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	1.734.716 – 4.028.977	32	65,31
2.	4.027.978 – 6.323.240	14	28,57
3.	6.323.241 – 8.617.500	3	6,12
	Jumlah	49	100,00

Dari Tabel 4 tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar petani responden, yaitu 32 orang (65,31%) tergolong berpendapatan antara Rp.1.734.716 – Rp. 4.028.977 per tahun, petani yang tergolong berpendapatan antara Rp. 4.027.978 – Rp. 6.323.240 per tahun sebanyak 14 orang (28,57%) dan sisanya sebanyak 3 orang (6,12%) berpendapatan antara Rp. 6.323.241 – Rp. 8.617.500.

Bila dikaitkan dengan luas lahan, dimana petani yang mempunyai lahan

luas sebanyak 3 orang memberikan pendapatan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin luas lahan garapan akan diikuti dengan pendapatan yang tinggi. Namun demikian tidak selamanya lahan yang luas memberikan pendapatan yang tinggi, seperti halnya pada petani yang mempunyai luas lahan sedang sebanyak 26 orang, tidak semuanya memberikan tingkat pendapatan sedang, yaitu hanya 14 orang yang memberikan tingkat pendapatan

sedang. Hal ini kemungkinan disebabkan petani tersebut dalam pemeliharaan hutan rakyatnya kurang optimal, sehingga menyebabkan pendapatan usahatani yang diperoleh menjadi kecil.

3. Hubungan Luas Lahan dengan Pendapatan Petani

Berdasarkan hasil perhitungan uji statistik Korelasi Rank Spearman, diperoleh nilai $r = 0,941$, nilai koefisien tersebut termasuk kategori kuat. Hal ini berarti terdapat hubungan positif antara luas lahan garapan dengan tingkat pendapatan petani usahatani hutan rakyat sebesar 0,941. Dari hasil uji signifikansi (uji-t) diperoleh t_{hitung} sebesar 19,14 lebih besar dari $t_{0,05}$ sebesar 2,002 pada taraf nyata 5%, artinya terdapat hubungan positif yang nyata antara luas lahan garapan dengan tingkat pendapatan petani. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin luas lahan garapan petani akan diikuti dengan tingkat pendapatan petani semakin baik.

Sempitnya pemilikan lahan usahatani merupakan masalah dalam peningkatan hasil usahatani, sehingga kemungkinan merupakan hambatan terhadap keberhasilan pengembangan hutan rakyat. Sesuai dengan yang dikemukakan Kasryno (1984), bahwa petani yang mempunyai lahan luas, cenderung untuk mengadakan perubahan teknologi, dengan maksud peningkatan produktivitas usahatannya. Luas lahan garapan yang sempit akan menyebabkan kecilnya pendapatan petani sehingga

untuk memenuhi kebutuhan akan pangan biasanya mengusahakan lahannya dengan tujuan jangka pendek dan lebih intensif, tanpa memperhatikan kesesuaian dengan kemampuan lahannya.

Keragaman antara tingkat pendapatan ditentukan oleh luas lahan garapan dan produktivitas usahatani. Menurut Kasryno. (1984) tingkat pendapatan dapat menjadi dorongan dana rangsangan bagi petani untuk meningkatkan hasil usahatannya. Semakin besar pendapatan petani, semakin tinggi pula kemampuan permodalan untuk mengelola usahatannya, begitu juga dalam memelihara tanaman akan lebih intensif, sehingga tingkat pendapatan yang diperoleh dari hutan rakyat akan lebih tinggi dibandingkan dengan petani yang luas lahannya sempit. Dengan kata lain pengelolaan hutan rakyat yang intensif pada luas lahan yang luas akan diperoleh hasil yang tinggi, yang pada akhirnya akan timbul kekuatan baru yang mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan dalam pengembangan hutan rakyat.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dimuka, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : terdapat hubungan positif yang nyata antara luas lahan garapan dengan pendapatan petani pada usahatani hutan rakyat.

Pendapatan usahatani hutan rakyat dengan rata-rata luas lahan garapan 0,468 ha sebesar Rp. 2.550.318 atau setara Rp. 5.451.752 per hektar per tahun, dengan nilai R/C sebesar 3,24.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut : masih diperlukan pembinaan petani melalui kegiatan kelompok dan penyuluhan yang berkelanjutan, agar dapat meningkatkan kemampuan kelompoktani dalam pengembangan hutan rakyat, sehingga pendapatan petani meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kehutanan. 1996. Penyuluhan Pembangunan Kehutanan. Kerjasama Pusat Penyuluhan Kehutanan RI dan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. 2004. Petunjuk Teknis Pembangunan Hutan Rakyat, Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Semarang.
- Ida Nuraeni dan Herman Hidayat. 1994. Manajemen Usahatani. Universitas Terbuka, Jakarta.
- Kasryno, F. 1984. Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Mardikanto, T. 1993. Komunikasi Pembangunan. Sebelas Maret Universitas Press. Surakarta.
- Natsir, M. 1998. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sugarda. 1981. Katagorisasi dan Karakteristik Petani serta Pemanfaatan Dalam Kegiatan Penyuluhan. Tesis Fakultas Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Tim Bina Swadaya. 2001. Pengalaman Pendampingan Petani Hutan. Kasus Perhutanan Sosial di Pulau Jawa. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Wijaya. 2000. Statistik Non Parametrik (Aplikasi Program SPSS). Alfabeta. Bandung.